

## 1.PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

#### 1.1.1. Latar Belakang Pembentukan ASEAN

**Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)** yang resmi terbentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand sebenarnya bukan merupakan organisasi pertama yang merupakan wadah kerjasama regional di antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya telah terbentuk dua organisasi regional dengan nama *Association of Southeast Asia (ASA)* pada 31 Juli 1961 dengan anggota Federasi Malaya, Filipina dan Thailand serta MAPHILINDO (Malaysia, Filipina, Indonesia) pada 5 April 1963. Pendirian ASA lebih didasari pada keinginan untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan. Sementara pembentukan MAPHILINDO dikarenakan adanya pertimbangan kondisi politik dan juga masalah ras. Namun upaya untuk membangun kerjasama di antara negara anggota pada kedua organisasi regional Asia Tenggara tersebut mengalami hambatan terutama dengan terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia (termasuk Singapura yang saat itu masih menjadi bagian dari Federasi Malaya) pada 1963 dan juga sengketa wilayah Sabah antara Malaysia dan Filipina yang dimulai pada 1961.<sup>1</sup>

Perubahan kondisi politik domestik dan keamanan di negara-negara bekas anggota kedua Organisasi Regional tersebut pada 1965 seperti munculnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia, terpilihnya Ferdinand Marcos sebagai Presiden Filipina menggantikan Presiden Macapagal serta keluarnya Singapura dari Federasi Malaya, tampaknya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya ASEAN. Perubahan pemerintahan di Indonesia dari Orde Lama ke

---

<sup>1</sup> Estrella D. Solidum, *The Politics of ASEAN : An Introduction to Southeast Asia Regionalism* (Eastern University Press, 2003), p. 16.

Orde Baru misalnya berdampak pada upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan citra dari negara yang agresif terhadap negara tetangga kepada suatu bentuk hubungan bertetangga baik demi membangun ketahanan regional yang dapat menunjang stabilitas nasional dan proses pembangunan ekonomi domestik. Sementara Presiden baru Filipina saat itu Ferdinand Marcos mulai menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap Malaysia dalam kasus Sabah. Sedangkan lepasnya Singapura dari Federasi Malaya, membuat negara yang sering disebut sebagai *china island in Malaya* mulai memikirkan langkah-langkah untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangganya dengan wilayah yang besar seperti Malaysia dan Indonesia, agar tidak merasa dikucilkan atau mengalami tekanan dari negara tetangga.<sup>2</sup>

Perubahan kondisi politik dan keamanan domestik tersebut juga diperkuat dengan motivasi negara-negara pelopor pendiri ASEAN lainnya untuk menjalin kerjasama regional yang lebih erat dalam naungan institusi formal. Malaysia misalnya masih tetap memiliki keinginan yang kuat untuk memperluas kerjasama yang pernah dirintis melalui ASA serta melakukan perbaikan hubungan dengan Indonesia. Sementara Thailand dalam kondisi terancam akan situasi konflik di Indochina khususnya pecahnya Perang Vietnam sejak 1964 semakin merasakan perlunya untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangganya di luar Indochina dalam rangka memperkuat ketahanan regional dan nasional. Di samping itu Thailand juga senantiasa berusaha menempatkan dirinya sebagai juru damai terhadap persoalan konflik antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Filipina sendiri selain alasan perubahan sikap terhadap masalah Sabah, juga berupaya menggunakan kerjasama regional ASEAN sebagai upaya untuk membuka saluran komunikasi dengan Malaysia sekaligus merubah citra bangsa Filipina yang selama ini selalu dianggap sebagai bangsa Barat karena kuatnya pengaruh penjajahan Spanyol dan juga pendudukan AS terhadap budaya masyarakat Filipina. Di samping itu seperti halnya dengan Thailand, Filipina juga memiliki pengalaman sebagai mediator pada konfrontasi Indonesia dan Malaysia melalui Komunike Adam Malik dan Ramos pada 1966.

---

<sup>2</sup> M. Sabir, *ASEAN Harapan dan Kenyataan* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992), h. 29

Kendati Menteri Luar Negeri Thailand saat itu Thanat Koman dapat dianggap sebagai pendorong utama berdirinya ASEAN, namun secara operasional, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik lah yang dapat dikatakan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan Organisasi Regional ASEAN. Di samping kelima negara pelopor pendirian ASEAN, Myanmar (yang saat itu masih bernama Burma) dan Kamboja sebenarnya telah didekati oleh Indonesia untuk bergabung dengan ASEAN. Bahkan sempat pula muncul keinginan untuk memperluas keanggotaan ASEAN kepada negara-negara anggota Gerakan Non Blok di kawasan Asia Selatan. Sri Lanka misalnya sempat menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan kerjasama regional Asia Tenggara namun kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri.<sup>3</sup>

Kendala utama dalam proses pendirian ASEAN adalah masalah kerjasama keamanan dengan pihak asing terutama negara besar dalam konteks perang dingin. Filipina dan Thailand misalnya menerima tawaran Amerika Serikat untuk bergabung dengan Aliansi Pertahanan untuk kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada 1954 dengan nama *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO). Pendirian Aliansi Keamanan tersebut sebagai operasionalisasi dari kebijakan pembendungan AS di hampir seluruh kawasan dunia sejak perang dingin dimulai pada 1948. Bahkan di wilayah Filipina Subic dan Clark terdapat pangkalan militer AS yang berdiri sejak 1951. Sementara Malaysia dan Singapura juga masih terikat dengan negara bekas penjajahnya yaitu Inggris melalui *Anglo Malaya Defense Agreement* (AMDA) sejak akhir dekade 50-an yang kemudian berkembang menjadi *FivePower Defense Arrangement* (FPDA) pada 1971 bersama Inggris, Australia dan Selandia Baru. Indonesia sendiri sempat mempermasalahkan kerjasama keamanan tersebut dengan mengusulkan satu pasal dalam Perjanjian pendirian ASEAN mengenai tidak diperbolehkannya adanya pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara. Namun karena adanya keberatan dari negara-negara ASEAN yang telah menjalin kerjasama keamanan dengan pihak asing di luar ASEAN, maka klausul tersebut dihilangkan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 31

Karena itulah ketika negara-negara pelopor pendirian ASEAN (Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina dan Thailand) sepakat untuk menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, masalah keamanan tidak diungkapkan secara jelas dalam deklarasi tersebut. ASEAN kemudian lebih memfokuskan diri pada kepentingan untuk melakukan kerjasama secara ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini mengingat bahwa masalah keamanan merupakan masalah yang sensitif bagi negara-negara pendiri ASEAN. Tidak saja karena masih banyaknya konflik antar negara anggota yang belum dapat diselesaikan secara maksimal, namun juga berkaitan dengan masalah kerjasama keamanan yang dirintis beberapa negara anggota dengan pihak asing terutama negara-negara besar.

### **1.1.2. Perkembangan ASEAN sejak 1967 sampai KTT ASEAN Pertama di Bali 1976**

Setelah ASEAN terbentuk, Organisasi Regional tersebut langsung dihadapkan pada dua tantangan besar yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Pertama adalah masih berlanjutnya persoalan konflik antara Indonesia dan Singapura sebagai dampak dari konfrontasi pada 1963. Permasalahan tersebut muncul ketika Singapura memutuskan untuk menjatuhkan hukuman gantung kepada dua marinir Indonesia, Usman dan Harun, yang tertangkap ketika melakukan kegiatan pengintaian di perairan dekat Singapura. Kendati tindakan Singapura memunculkan kecemasan dari masyarakat Indonesia pada umumnya, tetapi diplomasi yang dilakukan oleh mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik terhadap Pemerintah Singapura ternyata mampu menjaga harmonisasi ASEAN walaupun tetap tidak dapat mengubah keputusan Singapura terhadap hukuman gantung tersebut.<sup>4</sup>

Tantangan lain adalah memanasnya kembali hubungan antara Malaysia dan Filipina masih dalam konteks masalah Sabah. Pada bulan April 1968 sampai dengan Desember 1969 hubungan antara Filipina dan Malaysia memburuk dikarenakan adanya isu atas klaim Filipina terhadap wilayah Sabah yang merupakan negara bagian dari Malaysia. Kendati persoalan perebutan wilayah

---

<sup>4</sup> Rizal Sukma, "ASEAN Sebagai Komunitas Diplomatik : Peran Tugas dan Strategi" dalam Bantarto Bandoro (ed.), *Agenda Penataan Keamanan di Asia Pasifik* (Jakarta : CSIS, 1996), h. 58

tersebut telah dimulai sejak 1961, namun puncak ketegangan muncul pada tahun 1968 ketika pers Filipina memberitakan bahwa terdapat tentara rahasia yang dilatih di Pulau Corregidor dalam rangka persiapan melakukan invasi ke Sabah. Pemerintah Filipina sendiri sebenarnya telah melakukan penyangkalan terhadap berita tersebut terutama keterlibatan pemerintah Filipina terhadap rencana invasi ke Sabah namun masalah Corregidor tetap mengganggu hubungan Filipina dengan Malaysia termasuk keberadaan ASEAN yang baru memasuki usia enam bulan setelah masa pendiriannya. Kendati Indonesia dan Thailand menawarkan jasa baik sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah Sabah tersebut namun pemerintah Filipina dan Malaysia lebih memilih untuk melakukan pertemuan bilateral tanpa adanya pihak ketiga. Pertemuan tersebut kemudian tidak membawa hasil dan diikuti dengan sikap tegas pemerintah Malaysia untuk tidak hadir dalam pertemuan formal ASEAN karena kekhawatiran pemerintah Malaysia bahwa pemerintah Marcos akan mengangkat masalah klaim atas Sabah dalam forum ASEAN.<sup>5</sup>

Kebuntuan masalah Sabah antara Malaysia dan Filipina akhirnya dapat dicairkan dengan pernyataan formal pemerintah Filipina untuk tidak membahas masalah Sabah dalam forum ASEAN pada Maret 1969. Langkah tersebut diikuti dengan perbaikan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Filipina pada Desember 1969 melalui pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kesepakatan untuk mengesampingkan masalah Sabah demi harmonisasi ASEAN.

Pada masa awal pendiriannya, struktur ASEAN terdiri atas Pertemuan Rutin Tingkat Menteri Luar Negeri (*AMM = Annual Ministerial Meeting*) dimana agenda kerja ASEAN diputuskan, *Standing Committee (SC)* yang merupakan pihak tuan rumah dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN, kemudian *Permanent Committee* yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan agenda yang telah disusun dalam *AMM* dan *National Secretariat* yang terdiri atas Biro Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sosial Budaya.<sup>6</sup>

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa perubahan kondisi keamanan di kawasan Indochina yang ditandai dengan meluasnya Perang Vietnam

---

<sup>5</sup> Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and The Problem of Regional Order* (London & New York : Routledge, 2001). p 49-50

<sup>6</sup> Jamil Maidan Flores, *ASEAN : How It Works* (Jakarta : ASEAN Secretariat, 2000), p. 22.

ke wilayah Laos dan Kamboja serta pembukaan hubungan diplomatik antara AS dan RRC pada 1972 membawa ASEAN kepada tantangan baru yang berasal dari luar wilayah negara anggota ASEAN. Meluasnya eskalasi serta meningkatnya keterlibatan AS dalam Perang Vietnam di akhir dekade 60-an, membuat Malaysia dan Thailand mengusulkan proposal tentang netralitas ASEAN terhadap Perang Vietnam. Sementara perkembangan hubungan baru antara AS dan RRC menimbulkan tanda tanya bagi negara-negara ASEAN khususnya Indonesia, Thailand, Filipina dan Malaysia yang masih memiliki masalah dengan komunisme RRC. Filipina sendiri kemudian mengusulkan perlunya diadakan Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN.

Pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di New York Oktober 1971 ketiga agenda tersebut dibahas. Pertemuan lanjutan di Kuala Lumpur pada 26-27 November 1971 berhasil mencapai tiga kesepakatan penting yaitu Dokumen tentang *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*, rekomendasi terhadap penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi ASEAN dan konsultasi terhadap berbagai masalah politik internasional yang mempengaruhi ASEAN.<sup>7</sup>

ASEAN kemudian untuk pertama kalinya menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau tingkat Kepala Negara pada 1976 di Bali. Hasil dari KTT tersebut berupa Dokumen *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* yang kemudian dikenal sebagai *ASEAN Way* dan Dokumen *ASEAN Concord*. Dalam TAC ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang diterima sebagai norma atau cara ASEAN yang terdiri atas *Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity by the following fundamental principles; The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversive or coercion; Non-Interference in the internal affairs of one another ; Settlement of differences or disputes by peaceful means; Renunciation of the threat or use of force; serta Effective cooperation among themselves*. Sementara dokumen ASEAN Concord lebih bersifat operasionalisasi kerjasama ASEAN di

---

<sup>7</sup> Heiner Hanggi, *ASEAN and the ZOPFAN Concept* (Pacific Strategic Paper) (ISEAS : Regional Studies Programme, 1991), p. 16-17.

bidang ekonomi, sosial dan budaya. KTT ASEAN I kemudian diikuti dengan penyelenggaraan KTT ke II tahun 1977 di Kuala Lumpur.<sup>8</sup>

Sejak diselenggarakannya KTT ASEAN I di Bali 1976 maka struktur ASEAN diperluas dengan adanya ASEAN *Head of Government* dan peresmian ASEAN *Secretariat* yang berlokasi di Jakarta. Sedangkan melalui KTT ke II di Kuala Lumpur tahun 1977 diputuskan untuk mendirikan *The ASEAN Economic Minister (AEM)* dan juga mulai dilaksanakannya *The Post Ministerial Conference* setelah Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN setiap tahunnya.<sup>9</sup>

### **1.1.3. Perkembangan ASEAN pasca KTT ASEAN 1976 hingga akhir dekade 80-an : Penguatan Peran ASEAN dan Peningkatan Konsolidasi Negara Anggota.**

Penyelenggaraan KTT ASEAN I pada 1976 sebenarnya juga dipengaruhi dengan perkembangan kondisi di Indochina terutama ketika Perang Vietnam mencapai titik kulminasi pada 1975. Berakhirnya perang Vietnam yang ditandai dengan terbentuknya Republik Demokratik Vietnam yang berhaluan Sosialis Komunis dan mundurnya AS dari kawasan Vietnam sempat melahirkan optimisme di kalangan negara-negara anggota ASEAN khususnya Singapura dan Thailand akan terciptanya situasi yang lebih kondusif di kawasan Indochina. Pandangan tersebut diperkuat dengan upaya Vietnam untuk menjalin hubungan damai dengan ASEAN melalui kunjungan Menteri Luar Negeri Nguyen Duy Trinh ke negara-negara ASEAN sepanjang 1977 dan 1978. Perkembangan kondisi di Indochina juga berpengaruh pada persepsi ASEAN terhadap RRC khususnya Malaysia yang kemudian memutuskan untuk menormalisasi hubungannya dengan RRC.<sup>10</sup>

Namun optimisme ASEAN tersebut tidak bertahan lama terutama ketika pada Desember 1978 Vietnam melakukan intervensi militer ke Kamboja. Pemerintah Vietnam sendiri berdalih bahwa intervensi tersebut atas undangan

<sup>8</sup> Lihan Dokumen TAC dan ASEAN Concord

<sup>9</sup> Flores, *Op.cit.*, p. 29-33

<sup>10</sup> Acharya, *op.cit.*, hal. 86

pecahan kelompok Khmer Merah pimpinan Heng Samrin<sup>11</sup> yang meminta bantuan Vietnam untuk menggulingkan pemerintahan Pol Pot yang melakukan sejumlah tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejak awal dekade 70-an Kamboja memang mengalami ketidakstabilan kondisi domestik terutama setelah terjadi penggulingan pemerintahan Lon Nol yang pro-Barat oleh Pol Pot yang berhaluan Sosialis dan memiliki tipe pemerintahan yang otoriter dan kerap menggunakan tindak kekerasan.

Di bawah pemerintahan Pol Pot, rakyat Kamboja mengalami penderitaan yang berkepanjangan tidak hanya karena tekanan kekerasan politik namun juga kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Kehadiran Vietnam pada mulanya sempat dianggap sebagai “dewa penolong” oleh sebagian masyarakat Kamboja karena berhasil menyingkirkan Pol Pot dari tampuk kepemimpinan. Namun lebih lanjut kehadiran Vietnam yang kemudian membentuk pemerintahan baru di Kamboja di bawah pimpinan Heng Samrin (kemudian digantikan oleh Hun Sen) semakin memperkeruh kondisi domestik Kamboja. Hal ini dikarenakan legitimasi pemerintahan tersebut tidak diterima oleh kelompok-kelompok lain di Kamboja seperti kelompok Nasionalis (*KPNLF : Khmer People’s National Liberation Front*) pimpinan Son Sann, kelompok Khmer Merah yang berafiliasi ke RRC pimpinan Khieu Samphan dan kubu Kerajaan (*FUNCINPEC*) di bawah pimpinan Pangeran Sihanouk termasuk pihak internasional. Sehingga terjadi kekosongan pada kursi keanggotaan Kamboja di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dimulainya konflik domestik Kamboja yang berkepanjangan.<sup>12</sup>

ASEAN sendiri kemudian melancarkan kecaman keras terhadap intervensi Vietnam tersebut. Terlebih intervensi tersebut dianggap merupakan ancaman terhadap penerapan norma ASEAN dalam TAC khususnya mengenai prinsip *non-interference*. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Januari 1979 di Bangkok ASEAN mengeluarkan sejumlah kesepakatan untuk mengantisipasi kondisi domestik Kamboja yaitu menolak mengakui legitimasi pemerintahan buatan Vietnam, menyerukan kepada dunia internasional untuk mengisolasi

<sup>11</sup> Damien Kingsbury, *Southeast Asia : A Political Profile* (London : Oxford University Press, 2001), p. 214.

<sup>12</sup> D.R. Sar De Sai, *ASEAN Past Present and Future* (Chiang Mai : Silkworm Books, 1996) p. 339.

Kamboja, menyerukan penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja tanpa syarat, mencegah perluasan pengaruh intervensi Vietnam terutama ke Thailand, berupaya membangun Kamboja yang damai, netral dan demokrasi serta semakin memperkokoh kerjasama ASEAN agar tidak mudah dikuasai oleh kekuatan luar dan memperkuat prinsip perdamaian ASEAN. Pada Maret 1980 ASEAN juga sepakat untuk melakukan pemutusan hubungan dagang dengan Vietnam. Indonesia dan Malaysia kemudian melalui Pertemuan Kuantan merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik Kamboja.<sup>13</sup>

Sehingga sepanjang dekade 80-an upaya untuk menyelesaikan konflik internal berkepanjangan di Kamboja menjadi perhatian utama ASEAN. Namun usulan ASEAN untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Kamboja di awal tahun 1980 ditolak oleh Vietnam. Tetapi pada awal tahun 1981 Vietnam justru menawarkan penarikan mundur pasukannya tetapi lebih diutamakan dari wilayah Kamboja yang berbatasan dengan Thailand. Konferensi Internasional tentang Kamboja akhirnya dapat terwujud melalui prakarsa ASEAN pada Juli 1981 yang mendapat dukungan dari PBB dan juga negara-negara Barat. Usulan yang disampaikan melalui konferensi tersebut adalah terciptanya gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai di Kamboja di bawah pengawasan pasukan perdamaian (*Peace Keeping Operation*) PBB. Pada bulan Juni 1982 berhasil dibentuk Pemerintahan Koalisi Kamboja untuk menempati kursi keanggotaan di PBB yang merupakan gabungan dari kelompok Sihanouk, Nasionalis dan Khmer Merah.

Di tengah-tengah kerumitan untuk menyelesaikan konflik Kamboja, ASEAN berhasil memperluas keanggotaan dengan bergabungnya Brunei Darussalam pada 1984. Kemudian pada 14-15 Desember 1987 ASEAN juga berhasil menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi yang ketiga di Manila. Meskipun dibayangi dengan perubahan kondisi domestik di Filipina yaitu kejatuhan pemerintahan Marcos namun KTT III ASEAN tetap dapat menghasilkan sebuah dokumen politik penting yaitu amandemen TAC tentang perluasan penerapan TAC terutama ke kawasan Asia Pasifik serta enam dokumen

---

<sup>13</sup> Acharya, *op.cit.*, p. 91- 92

ekonomi berupa peningkatan kerjasama industri, promosi dan proteksi terhadap investasi, kesepakatan perdagangan khususnya masalah penurunan kendala tarif dan tahun kunjungan wisata ASEAN yang ditetapkan pada 1992.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan masalah struktur ASEAN, pada KTT ke III di Manila 1987 tersebut juga dibentuk *The Senior Officials Meeting (SOM)* yang merupakan wadah untuk membahas kerjasama negara anggota di bidang politik yang hasilnya secara langsung akan dilaporkan kepada AMM. Di samping itu juga dibentuk *The Senior Economic Officials Meeting (SEOM)* sebagai sarana untuk membahas kerjasama ekonomi negara anggota yang hasilnya juga disampaikan secara langsung kepada AEM. Sementara untuk membahas masalah-masalah khusus di luar politik dan ekonomi, ASEAN juga membentuk *The ASEAN Senior Officials* untuk bidang *environment, drugs, social development civil services dan culture and information*. Kemudian diputuskan pula untuk dibentuk *The Joint Consultative Meeting (JMC)* yang merupakan sarana konsultatif antara ASEAN *Secretary General, The SOM, SEOM dan the ASEAN Directors General*.<sup>15</sup>

Terhambatnya penyelenggaraan KTT ketiga ini lebih kurang sepuluh tahun setelah KTT terdahulu pada 1987, di samping karena perkembangan kondisi di Indochina juga disebabkan memanasnya kembali hubungan Filipina dan Malaysia dalam masalah Sabah. Kondisi tersebut bahkan sempat melahirkan ancaman dari pihak Malaysia untuk tidak menghadiri KTT ASEAN yang memang sejak 1977 telah direncanakan untuk diselenggarakan di Manila Filipina. Namun perubahan kondisi politik di Filipina pada 1986 dengan naiknya Presiden baru Corazon Aquino akhirnya berhasil meredakan konflik dengan Malaysia untuk masalah Sabah.

ASEAN sendiri kemudian berhasil menyelenggarakan dua pertemuan penting yang semakin mengarahkan kamboja pada proses perdamaian yaitu *Jakarta Informal Meeting* pertama dan kedua pada tahun 1988 dan 1989. Kendati hasil dari kedua pertemuan tersebut tetap belum dapat menyelesaikan konflik, namun melalui pertemuan tersebut ASEAN berhasil memperoleh dukungan

---

<sup>14</sup> Syamsumar Dam, *Kerjasama Ekonomi di kawasan Asia Tenggara* (Jakarta : PT Ghalia, 2002), h. 62

<sup>15</sup> Solidum, *op.cit.*, p. 26.

internasional terutama dari PBB dan negara-negara Barat termasuk RRC yang juga memiliki kepentingan dalam penyelesaian konflik Kamboja.<sup>16</sup> Konflik Kamboja sendiri pada akhirnya berhasil diselesaikan melalui pertemuan di Paris 1991 yang diprakarsai oleh negara-negara Barat dan PBB. Dimana pada Pertemuan Paris tersebut, Vietnam menyetujui untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari Kamboja dan menyerahkan Kamboja dalam pemerintahan sementara di bawah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu UNTAC (*United Nations Transitional Authority on Cambodia*).

Sampai dengan akhir dekade 80-an, muncul sejumlah pandangan tentang peran ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Menurut Rizal Sukma Peneliti Senior dari CSIS Jakarta, ASEAN dapat dianggap sebagai Komunitas Diplomatik. Kendati peran ASEAN sejak masa pendiriannya justru banyak dipengaruhi oleh masalah keamanan kawasan namun ASEAN tampaknya masih ragu untuk menetapkan peran keamanannya. Sebaliknya ASEAN justru berhasil dalam membangun tiga fungsi yang kemudian dapat dilihat sebagai sebuah Komunitas Diplomatik yaitu kemampuan untuk menghindari dan mengelola konflik intra-ASEAN; kemampuan untuk mengelola tatanan regional melalui keberhasilan mengelola konflik intra-ASEAN dan kemampuan untuk mengambil posisi bersama dan mengartikulasikan posisi tersebut secara lancar dan tegas.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Alan Collins, ASEAN cukup berhasil memainkan peranannya dalam mengelola dilema keamanan kawasan (terutama dalam menghadapi konflik di Indochina) dikarenakan pelaksanaan tiga prinsip utama yaitu pola pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensus, kemudian penerapan *swept under the carpet* yang berarti bahwa apabila terdapat masalah konflik intra-ASEAN yang tidak berhasil mencapai keputusan secara konsensus, maka negara-negara anggota lebih suka menyimpan masalah tersebut; serta kemampuan untuk mengutamakan kepentingan ASEAN serta menjaga harmonisasi hubungan dalam institusi lebih dari upaya untuk menonjolkan kepentingan masing-masing negara anggota.

---

<sup>16</sup> Alan Collins, *The Security Dilemma of Southeast Asia* (Singapore : ISEAS, 2000), p. 113.

<sup>17</sup> Sukma, *loc.cit.*, hal. 56

#### 1.1.4. Latar Belakang dan Proses Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF)

Sejak didirikan melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, ASEAN tidak pernah secara terbuka mengungkapkan bentuk kerjasama keamanan. Bahkan dalam Deklarasi Bangkok ASEAN lebih mengutamakan bentuk kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>18</sup> Namun sejalan dengan terjadinya perubahan kondisi keamanan di tingkat internasional pada akhir dekade 80-an yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya sistem bipolar menyebabkan menurunnya jaminan keamanan negara besar di kawasan Asia Tenggara. Sejak pertengahan dekade 70-an kawasan Asia Tenggara memperoleh jaminan payung keamanan dari dua negara adidaya dengan kehadiran pangkalan Amerika Serikat di *Subic dan Clark* Filipina dan Uni Soviet di wilayah *Cham Ranh dan Danang* Vietnam.<sup>19</sup>

Dengan berakhirnya masa Perang Dingin, negara-negara ASEAN harus menghadapi kenyataan bahwa wilayah Asia Tenggara tidak lagi dijamin dengan payung keamanan AS dan Uni Soviet. Bahkan negara-negara ASEAN harus menghadapi tantangan baru akibat meningkatnya kekuatan militer RRC bahkan tindakan agresif RRC di Laut Cina Selatan khususnya perebutan kepulauan Spratly dengan Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina. Semula negara-negara ASEAN melakukan proses akuisisi persenjataan dengan membeli peralatan tempur seperti pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat, kendaraan lapis baja dan helikopter dari negara-negara Eropa Barat.<sup>20</sup>

Namun pada akhirnya negara-negara ASEAN menyadari bahwa tindakan melakukan akuisisi persenjataan tidak akan menjawab tantangan keamanan baru di kawasan. Sehingga dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992, negara-negara ASEAN untuk pertama kalinya mulai membahas langkah-langkah membangun kerjasama keamanan secara lebih terbuka dan lebih luas mencakup kawasan Asia Pasifik. Kerjasama keamanan

<sup>18</sup> Lihat ASEAN Declaration Bangkok 1967 dalam M. Sabir, *op.cit.*

<sup>19</sup> Alan Collins, *op.cit.*, p. 94

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 102

tersebut kemudian dirancang ASEAN dalam bentuk Forum Dialog yang menghasilkan rancangan pembentukan ASEAN *Regional Forum* (ARF). Di sisi lain ASEAN juga menyadari bahwa masalah keamanan regional pada masa paska perang dingin tidak lagi dapat di atasi secara *ad hoc* melainkan melalui pembentukan kelembagaan seperti ARF. Pembentukan ASEAN *Regional Forum* (ARF) merupakan suatu peristiwa bersejarah bagi kawasan Asia Pasifik dan merupakan prestasi ASEAN dalam upaya merealisasikan pembentukan sebuah forum dialog multilateral pertama di Asia Pasifik untuk membahas masalah stabilitas, kerjasama politik dan keamanan.

Forum ARF sendiri kemudian digagas pada tahun 1993 ketika diselenggarakannya Konferensi Tingkat Menteri ASEAN (*Annual Ministerial Meeting*) di Singapura dalam pertemuan *informal working dinner*.<sup>21</sup> Pembentukan ARF kemudian secara resmi dilakukan melalui pertemuan pertama di Bangkok pada 25 Juli 1994. Pembentukan ARF merupakan langkah yang penting khususnya bagi ASEAN namun juga merupakan forum keamanan regional yang unik. Dikatakan unik karena forum kerjasama keamanan yang digagas ASEAN tersebut ternyata dapat memperluas jangkauan sampai tingkat Asia Pasifik dan mampu melibatkan negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, China dan negara-negara besar Uni Eropa seperti Inggris, Perancis dan Jerman. ARF juga merupakan forum dialog yang dianggap mampu mensinergiskan agenda pengelolaan keamanan antara negara besar dengan negara berkembang khususnya ASEAN.<sup>22</sup>

Pada pertemuan ARF yang pertama tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation*) yang dihasilkan pada KTT ASEAN pertama di Bali tahun 1976 akan dijadikan *code of conduct* untuk menata hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Kemudian pada Sidang ARF ke II 1 Agustus 1995 yang diadakan di Brunei Darussalam dihasilkan kesepakatan bahwa ARF akan melakukan pengembangan dialog pada tiga sasaran yang jelas dan perlu dicapai secara

---

<sup>21</sup> F. Andrea, "Peran Keamanan ASEAN *Regional Forum*", dalam Bantarto Bandoro (Ed.), *op.cit.*, h. 75.

<sup>22</sup> Amitav Acharya, *Regionalism and Multilateralism* (Singapore : Times Academic Press, 2002), p. 181

bertahap yaitu (1) pembangunan kepercayaan regional; (2) diplomasi preventif dan (3) penjabaran berbagai pendekatan terhadap penyelesaian konflik secara damai.<sup>23</sup>

Pertemuan ARF dilakukan setiap tahun dan sejak dibentuk pada tahun 1994 menunjukkan peningkatan jumlah mitra dialog dimana pada pertemuan ARF pertama di Bangkok Juli 1994 dihadiri oleh 6 anggota ASEAN, 3 negara peninjau Asia Tenggara (Laos, Vietnam dan Papua Nugini), 2 negara konsultatif (Cina dan Rusia), 6 negara peninjau (AS, Australia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru dan Uni Eropa).<sup>24</sup> Sampai dengan tahun 2006 negara partisipan ARF terdiri atas sepuluh negara ASEAN, negara partner dialog ASEAN yaitu Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, China, Rusia, India, Mongolia, Korea Utara dan Pakistan ditambah negara observer yaitu Papua Nugini dan Sekretaris Jendral ASEAN mewakili Sekretariat ASEAN.<sup>25</sup>

ASEAN sendiri tetap mempertahankan ARF dalam bentuk dialog keamanan tanpa keinginan untuk menjadikan ARF sebagai institusi formal. Hal ini dikarenakan ASEAN tetap ingin menjadi *driving force* atau pengendali ARF terutama dalam menentukan agenda pembahasan dan dikhawatirkan apabila ARF menjadi sebuah institusi formal maka ARF dapat dikendalikan oleh negara besar khususnya Amerika Serikat yang memang sangat ingin membuat ARF menjadi institusi keamanan formal di Asia Pasifik. Di samping itu ASEAN juga menerapkan pola *multitrack diplomacy (track one dan track two)* dalam arti melibatkan kelompok non-negara sebagai *second track* khususnya para akademisi dan kelompok epistemis<sup>26</sup> untuk memberikan masukan kepada perwakilan

<sup>23</sup> C.P.F. Luhulima, "Masa Depan ASEAN Regional Forum" dalam Bantarto Bandoro (ed.), *op.cit.*, h. 87-89.

<sup>24</sup> Abdul Rivai Ras, *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik (Sudut Pandang Indonesia)* (Jakarta : TNI AL dan APSINDO, 2000), h. 37.

<sup>25</sup> Dominik Heller, "The Relevance of the ASEAN Regional Forum (ARF) for Regional Security in the Asia-Pacific", *Contemporary Southeast Asia* 27 No. 1 (2005), p. 125.

<sup>26</sup> Kelompok epistemis adalah kelompok yang membantu para pembuat kebijakan mengakui suatu kepentingan di bawah kondisi ketidakpastian. Kelompok tersebut berperan sebagai sumber inovasi kebijakan sebagai akses melalui mana inovasi tersebut menyebar secara internasional dan sebagai katalis dalam proses politis dan institusional yang mendorong dipilihnya tujuan bersama, Kelompok epistemis terdiri dari kaum profesional dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu. Lihat Ernst B. Haas, "Why

pemerintah dalam setiap pertemuan ARF. Langkah tersebut ditempuh ASEAN karena ASEAN lebih mengutamakan proses daripada pembentukan institusi yang ketat.

Pembentukan ARF juga tidak dapat dilepaskan dari keinginan ASEAN untuk tetap mempertahankan ketahanan regional sebagai konsep yang pernah disuarakan oleh mantan Presiden Suharto pada awal dekade 80-an. Konsep ketahanan regional merupakan perluasan dari konsep ketahanan nasional. Ketahanan Regional merupakan konsep baru yang dikembangkan RM Sunardi yang secara konseptual sama dengan teori Ketahanan Nasional. Artinya unsur dasarnya adalah sama, yaitu keuletan dan ketangguhan.<sup>27</sup>

Hanya saja perbedaan Ketahanan Nasional lebih memfokuskan kepada ketahanan internal suatu negara, artinya Ketahanan Nasional merupakan suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam, yang langsung, maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya.<sup>28</sup>

Sedangkan Ketahanan Regional adalah Ketahanan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu merupakan kondisi yang dinamis dari Kawasan/Regional yang bersangkutan, yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan regionalnya, artinya ia mencakup keseluruhan kepentingan negara-negara yang ada di dalam kawasan tersebut di dalam menghadapi segala macam bentuk tantangan, gangguan, hambatan dan ancaman, terutama sekali yang datangnya dari luar kawasan ini.<sup>29</sup>

---

Collaborate ? Issue-Linkage and International Regimes,” dalam Friedrich Kratochwill dan Mansfield (Ed.), *International Organization : A Reader* (New York : Harper Collins College Publishers, 1994) p. 368

<sup>27</sup> R.M. Sunardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa : Dalam Rangka Memperkokoh Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta : PT Kusternita Adidarma, 2004), h. 63

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 3

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 67

Pembentukan ARF diharapkan dapat semakin memperkuat ketahanan regional bahkan tidak saja di kawasan Asia Tenggara melainkan di Asia Pasifik. Ketahanan Regional tampaknya semakin dibutuhkan oleh negara-negara ASEAN pada masa pasca Perang Dingin dengan semakin kompleksnya kondisi keamanan di kawasan Asia Pasifik terutama setelah runtuhnya sistem Bipolar.

## 1.2. Perumusan Masalah

Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ARF. Indonesia telah dua kali menjadi tuan rumah ARF sejak Pertemuan ARF ketiga di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1996 yang berhasil mengeluarkan agenda yang lebih luas dalam merinci langkah-langkah menuju tercapainya sasaran ARF khususnya pengembangan *confidence building measure (CBMs)* dan pada tahun 2004 dimana ARF semakin mengembangkan perhatian kepada isu-isu keamanan non-tradisional seperti *piracy, illegal immigrant, illicit trafficking on small arms dan juga terorism*.

Namun yang menjadi permasalahan adalah selama sepuluh tahun keikutsertaan Indonesia dalam Pertemuan ARF sejak tahun 1994 sampai sekarang, belum pernah ada kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara kehadiran dan arti penting ARF sebagai sebuah terobosan baru dalam upaya pengelolaan keamanan dengan kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan ketahanan nasional khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

Seperti telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa pembentukan ARF sebenarnya merupakan sebuah peristiwa yang fenomenal. Karena ARF merupakan forum dialog keamanan multilateral pertama yang mempertemukan negara-negara besar bahkan seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dengan negara-negara berkembang termasuk anggota baru ASEAN. Karena itulah ARF sudah seharusnya dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi terciptanya stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik sejak awal pasca Perang Dingin.

Walaupun muncul tantangan keamanan terutama dari kebijakan pengembangan persenjataan nuklir yang dilakukan negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik seperti RRC, India, Pakistan dan Korea Utara serta masih

berlangsungnya konflik terbatas di semenanjung Korea dan juga konflik territorial antara China dan Taiwan maupun China dan Jepang serta persaingan antara India dan Pakistan di kawasan Asia Selatan termasuk dinamika hubungan keamanan antara Indonesia dan Australia terutama sejak terlepasnya Timor Timur dari wilayah Indonesia, namun sejak pertengahan dasawarsa 90-an tidak pernah terjadi konflik terbuka atau perang antar negara di kawasan Asia Pasifik. Sejumlah pengamat keamanan Asia Pasifik seperti Amitav Acharya, Simon SC Tay, Mary Cabalero dan CPF Luhulima menganggap kehadiran ARF membawa nuansa baru dalam pendekatan keamanan dengan pola *security with enemy* yang diikuti dengan peningkatan rasa saling percaya di bidang keamanan (*Confidence Building Measures* atau CBMs), kemudian juga transparansi dan penerbitan buku putih pertahanan yang kemudian harus dipublikasikan secara luas, merupakan faktor yang signifikan bagi upaya untuk mengelola keamanan regional di kawasan Asia Pasifik.

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang juga merupakan pelopor terbentuknya ARF dapat memanfaatkan kehadiran ARF dalam meningkatkan ketahanan nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Karena itu tesis ini berusaha untuk meneliti esensi *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan korelasinya dengan ketahanan nasional Indonesia khususnya bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994 atau tahun awal terbentuknya ARF sampai dengan tahun 2006. Berdasarkan permasalahan tersebut tesis ini akan menjawab pertanyaan penelitian seperti pada point 1.3 di bawah ini

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

1. Apa arti penting perkembangan ARF selama periode 1994 -2006 sebagai forum dialog keamanan di kawasan Asia Pasifik ?
2. Bagaimana peran Indonesia dalam pertemuan ARF selama tahun 1994-2006 ?
3. Apa kontribusi ARF terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan selama periode 1994-2006

#### 1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi arti penting kehadiran *ASEAN Regional Forum* sepanjang tahun 1994-2006 sebagai forum regional yang membahas masalah-masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik.
2. Mengidentifikasi peran Indonesia dalam Pertemuan *ASEAN Regional Forum* sepanjang tahun 1994-2006
3. Mengidentifikasi kontribusi *ASEAN Regional Forum* terhadap Ketahanan Nasional khususnya di bidang pertahanan dan keamanan periode 1994-2006

#### 1.5. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman terhadap kontribusi *ASEAN Regional Forum* terhadap ketahanan nasional khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006
2. Memberikan masukan kepada lembaga terkait khususnya Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan akan pentingnya kontribusi *ASEAN Regional Forum* terhadap peningkatan ketahanan nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

#### 1.6. Metode Penelitian

##### 1.6.1 Unit Analisis, Tempat dan Waktu Penelitian

Unit Analisis adalah *ASEAN Regional Forum* dan Ketahanan Nasional Indonesia khususnya gatra pertahanan dan keamanan. Penelitian akan menggunakan studi kepustakaan dan juga proses wawancara.

##### 1.6.2. Metode Penelitian dan Instrumen Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Kualitatif. Menurut John W. Creswell Penelitian Kualitatif adalah Penelitian yang bersifat interpretatif dan menggunakan metode induktif. Kemudian dalam penelitian kualitatif, Peneliti lebih mengutamakan proses daripada hasil dengan jalan memfokuskan diri pada proses pengumpulan dan analisis data dalam upaya membangun abstraksi, konsep,

hipotesis dan teori dari hal-hal yang lebih terperinci.<sup>30</sup> Oleh karena itu dalam melakukan penelitian mengenai kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan periode 1994-2006 akan lebih mengutamakan proses pengumpulan dan analisis data dalam upaya membangun interpretasi terhadap isi dokumen mengenai perkembangan ASEAN Regional Forum (ARF) dalam kurun waktu 1994 sampai dengan 2006 dan dokumen tentang ketahanan nasional Indonesia di bidang keamanan dan pertahanan Indonesia dalam kurun waktu 1994-2006. Di samping itu juga dilakukan proses wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses ASEAN Regional Forum maupun pihak-pihak yang memahami secara mendalam mengenai kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan

Dengan demikian metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah studi dokumen dengan menggunakan instrumen penelitian berupa dokumen mengenai hasil-hasil Pertemuan ASEAN Regional Forum baik Pertemuan Tahunan maupun Pertemuan Intersessional dan juga kegiatan Workshop dan Seminar sepanjang periode 1994-2006. Kemudian juga akan digunakan instrumen penelitian berupa dokumen yang berisikan kebutuhan pertahanan dan keamanan Indonesia sepanjang periode 1994-2006 seperti Buku Putih Pertahanan 2003, Doktrin Pertahanan dan Strategic Defense Review 2004 dan 2005.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah melalui pengumpulan data primer mengenai hasil-hasil Pertemuan ASEAN Regional Forum baik Pertemuan Tahunan maupun Pertemuan Intersessional dan juga kegiatan Workshop dan Seminar sepanjang periode 1994-2006 termasuk pemberitaan ASEAN Regional Forum di sejumlah surat kabar Indonesia dan juga data-data mengenai kebutuhan pertahanan dan keamanan Indonesia sepanjang periode 1994-2006 seperti Buku Putih Pertahanan 2003, Doktrin Pertahanan dan *Strategic Defense Review* 2004 dan 2005.

---

<sup>30</sup> John W. Creswell, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approach* (London : Sage Publications, 1994), p. 145

Di samping itu juga dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam *ASEAN Regional Forum (ARF)* khususnya dari Departemen Pertahanan maupun pihak akademisi yang mengikuti kegiatan *second track*

#### **1.6.4. Teknik Analisis Data**

##### **Langkah-Langkah Analisis Data**

Proses Analisis dimulai dengan menganalisis isi (*content analysis*) dari dokumen hasil-hasil pertemuan ASEAN Regional Forum dari tahun 1994-2006 baik Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri maupun Pertemuan Sela dan juga Seminar dan Workshop serta pemberitaan mengenai ASEAN Regional Forum yang termuat dalam sejumlah surat kabar Indonesia guna menemukan arti penting dari ARF sebagai satu-satunya Forum Keamanan Multilateral di kawasan Asia Pasifik. Kemudian dilakukan pula proses analisis isi dari Dokumen yang memuat mengenai kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang tahun 1994-2006 berupa Dokumen Doktrin Pertahanan, Buku Putih Pertahanan dan Dokumen Kajian Strategis Pertahanan.

Di samping itu akan dilakukan proses analisis isi wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Forum ARF baik yang mewakili jalur pertama dari pemerintah Indonesia (pejabat pertahanan/militer yang pernah mengikuti kegiatan ARF maupun memiliki kepentingan terhadap hasil-hasil kegiatan ARF) maupun dari jalur kedua yang merupakan akademisi atau perwakilan komunitas epistemis. Sebelumnya akan disusun daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian serta hasil-hasil dari pengumpulan dokumen atau data sekunder tentang perkembangan Pertemuan ARF dari tahun 1994-2006. Tujuan dari proses wawancara adalah memperkuat analisis isi dokumen melalui pengumpulan data pengalaman nyata dari para responden yang terlibat langsung dengan pertemuan ASEAN Regional Forum.

Setelah melakukan proses analisis isi dokumen dari Hasil-Hasil Pertemuan Tahunan, Pertemuan Sela maupun Workshop dan Seminar dari ASEAN Regional Forum sepanjang periode 1994-2006 maka akan dilakukan identifikasi terhadap

arti penting kehadiran ASEAN Regional Forum bagi kawasan Asia Pasifik. Kemudian juga akan dilakukan identifikasi terhadap peran Indonesia dalam pertemuan tahunan ASEAN Regional Forum sepanjang kurun waktu 1994-2006. Hasil identifikasi tersebut kemudian akan dihubungkan dengan hasil dari proses identifikasi terhadap kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006 untuk dapat menemukan kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kurun waktu 1994-2006.

#### **1.6.5. Penggunaan Teori Dalam Analisis**

Dalam menganalisis kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional Indonesia khususnya gatra pertahanan dan keamanan (Periode Tahun 1994-2006), maka akan dilakukan proses operasionalisasi konsep atau teori yang akan dijelaskan pada Bab II.

Kerangka Teori yang akan dipergunakan untuk menjelaskan arti penting kehadiran ASEAN Regional Forum sepanjang periode 1994-2006 adalah teori tentang keamanan kawasan dan ketahanan regional yang akan dipakai sebagai pisau analisis untuk menjelaskan karakter kerjasama multilateral ASEAN Regional Forum. Kemudian juga konsep mengenai norma-norma ASEAN khususnya *Treaty of Amity and Cooperation* dan ASEAN Way yang telah diadopsi sebagai dasar proses pengembangan ASEAN Regional Forum. Sedangkan teori tentang keamanan kooperatif (*cooperative security*) akan digunakan untuk menganalisis mekanisme ASEAN Regional Forum termasuk di dalamnya gagasan-gagasan Indonesia dalam Pertemuan Tahunan ASEAN Regional Forum sepanjang periode 1994-2006 untuk dapat menemukan arti penting dari kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai forum multilateral satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang membahas masalah keamanan.

Kemudian teori tentang ketahanan nasional akan dipakai sebagai pisau analisis untuk meneliti perkembangan ketahanan nasional Indonesia dalam kurun waktu 1994 hingga 2006 khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Hasil analisis tersebut kemudian akan digabungkan dengan analisis mengenai arti

penting kehadiran ASEAN Regional Forum sehingga dapat dianalisis mengenai kontribusi ASEAN Regional Forum bagi ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994 sampai dengan 2006.

### 1.7. Sistematika Penulisan

- Bab I berisi Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan
- Bab II berisi Landasan Teori baik berupa konsep-konsep atau teori yang berkaitan dengan pengertian keamanan kawasan dan juga teori yang akan menjadi pisau analisis dalam menjelaskan karakter ASEAN Regional Forum dan juga mekanisme ASEAN Regional Forum dengan menggunakan teori keamanan kooperatif dan ketahanan regional. Kemudian juga akan dijelaskan mengenai teori ketahanan nasional yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas perkembangan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006
- Bab III berisi penjelasan mengenai Perkembangan ASEAN Regional Forum dari tahun 1994 sampai dengan 2006 termasuk di dalamnya penjelasan terhadap gagasan Indonesia dalam forum ARF sepanjang kurun waktu tersebut serta analisis dengan menggunakan teori keamanan kooperatif (*cooperative security*) dan ketahanan regional Dalam Bab ini juga akan dijelaskan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasional khususnya di bidang pertahanan dan keamanan serta analisis dengan menggunakan teori ketahanan nasional.
- Bab IV merupakan analisis mengenai arti penting dari kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai forum keamanan multilateral satu-satunya di kawasan Asia Pasifik serta kontribusinya terhadap ketahanan nasional Indonesia bidang pertahanan dan keamanan sepanjang kurun waktu 1994 sampai dengan 2006.
- Bab V merupakan kesimpulan yang berisi temuan penelitian.